
Etika Pengentasan Kemiskinan: Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Mahatma Gandhi

A. Arfinanto Arsyadani¹, Khusniati Rofiah²

¹ IAIN Ponorogo; Indonesia

² IAIN Ponorogo; Indonesia

arfinarsyadani@gmail.com, khusniati.rofiah@iainponorogo.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/09/01;

Accepted: 2024/10/11; Published: 2024/12/26

Abstract

This article discusses a comparative perspective of Ibn Taimiyah and Mahatma Gandhi regarding the ethics of poverty alleviation. Despite coming from different religious and cultural backgrounds, both figures offer profound insights into economic equality and social justice, as well as an ethical framework for addressing poverty. Ibn Taimiyah emphasizes the importance of wealth management based on Islamic principles, while Gandhi highlights simplicity, self-reliance, and the fair distribution of resources in line with the philosophy of ahimsa (non-violence). This article aims to formulate a practical approach to the ethics of poverty alleviation based on the thoughts of these two figures

Keywords

Ibn Taimiyah, Mahatma Gandhi, Ethics of Poverty Alleviation



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Etika adalah konsep yang menilai perilaku manusia untuk menentukan tindakan yang benar atau salah. Selain sebagai cabang filsafat moral, etika juga berfungsi sebagai panduan untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat.¹ K. Bertens melihat etika terapan sebagai penerapan prinsip-prinsip moral pada isu-isu konkret, seperti kemiskinan. Ia menekankan pentingnya konteks sosial dalam menganalisis tindakan dan menghadapi dilema moral yang muncul.² Dalam konteks pengentasan kemiskinan, etika terapan berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan teori moral dengan tindakan praktis, membantu individu dan masyarakat membuat keputusan yang lebih etis dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan ketidakberdayaan ekonomi dan kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mendapatkan perlakuan layak dan hidup secara terhormat.³

¹ Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum," *Jurnal Litigasi* Vol. 22, no. 2 (2021): 205–29.

² Kees Bertens, *Etika*, vol. 21 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

³ Ma'wa, Roudlotul, and Iwan Fahri Cahyadi, "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kabupaten

Kemiskinan menghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan berbagai masalah sosial. Daya beli masyarakat miskin yang rendah menyebabkan efek ganda (*multiplier effect*) menjadi semakin kecil sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dapat berkembang dengan pesat.⁴ Kemiskinan terbagi menjadi dua jenis: absolut dan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sementara kemiskinan relatif terjadi dalam persaingan ekonomi dengan kelompok lain.⁵

Islam sangat menentang kemiskinan dan menganggapnya sebagai musibah yang harus diperangi.⁶ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang masih bisa bekerja dan memperoleh penghasilan halal, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan orang miskin sebagai mereka yang tidak memiliki harta maupun tenaga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.⁷ Problem kemiskinan menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia.⁸ Penurunan angka kemiskinan hanya dapat dicapai secara optimal jika semua pihak, termasuk masyarakat miskin, terlibat dalam proses dan pemanfaatan hasil pembangunan.⁹ Kemiskinan bahkan menjadi wacana yang paling krusial dibandingkan isu lain seperti iklim, terorisme, dan perang.¹⁰ Kemiskinan mengakibatkan jutaan anak sulit mengakses pendidikan berkualitas, kesulitan biaya kesehatan, minimnya tabungan dan investasi, terbatasnya akses pelayanan publik, kurangnya lapangan kerja dan jaminan sosial, serta memperkuat arus urbanisasi.¹¹

Ibnu Taimiyah dan Mahatma Gandhi adalah dua tokoh berpengaruh yang memberikan pandangan signifikan mengenai etika pengentasan kemiskinan. Ibnu Taimiyah, sebagai pemikir Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab komunitas dalam menghadapi kemiskinan. Dia mengajak masyarakat untuk bersedekah dan membayar zakat. Cara ini

Kudus) | Ma'wa | JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus," n.d.

⁴ Farathika Putri Utami, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh | Jurnal Samudra Ekonomika," n.d.

⁵ Rosyidi S, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁶ Wildana Wargadinata, *Islam dan pengentasan kemiskinan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), <http://repository.uin-malang.ac.id/1191/>.

⁷ Al Arif and M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, Dan Analisis*. (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁸ Johan Arifin, "Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," *Sosio Informa* 6, no. 2 (August 25, 2020): 114–32, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>.

⁹ Putri Anita Rahman, Firman Firman, and Rusdinal Rusdinal, "KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIOLOGI," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (December 3, 2019): 1542–48, <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>.

¹⁰ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.

¹¹ Prawoto, "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, April 1, 2008, <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530/1578>.

dipandanginya efektif dalam membantu mereka yang membutuhkan.¹² Di sisi lain, Mahatma Gandhi yang merupakan Bapak Bangsa India. Dia menjadi orang pertama di abad ke-20 yang berjuang untuk kemerdekaan negaranya dengan menginisiasi gerakan pantang kekerasan sebagai nilai perjuangannya.¹³

Ibn Taimiyah dan Mahatma Gandhi berasal dari latar belakang budaya, agama, dan sejarah yang sangat berbeda. Ibn Taimiyah adalah seorang pemikir Islam yang hidup pada abad ke-13, sementara Gandhi adalah pemimpin spiritual dan politik dari India yang aktif pada awal abad ke-20. Pemikiran keduanya menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memberikan alternatif solusi atas problem pengentasan kemiskinan. Kedua tokoh ini sama-sama pernah merasakan dinginnya jeruji besi penjara. Ibn Taimiyah dipenjara enam kali karena pandangan teologisnya yang kontroversial, terutama kritik terhadap ziarah kubur dan penggunaan tawassul, yang bertentangan dengan ulama tradisional dan otoritas politik saat itu. Penahanan terakhirnya di Benteng Qal'ah, Damaskus hingga wafat pada 1328.¹⁴ Sedangkan Mahatma Gandhi dipenjara sembilan kali. Pertama kali pada 1908 di Afrika Selatan karena menentang diskriminasi rasial. Di India, ia dipenjara karena memimpin gerakan perlawanan terhadap penjajahan Inggris, termasuk Gerakan Non-Kerjasama, Salt March, dan Quit India. Penahanannya terlama terjadi pada 1942, selama hampir dua tahun.¹⁵

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang mendalam mengenai kemiskinan dan redistribusi kekayaan dalam konteks keadilan sosial. Ia melihat kemiskinan bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi sebagai isu sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip Islam.¹⁶ Ibn Taimiyah menekankan pemungutan zakat dan pajak secara adil sebagai instrumen redistribusi keadilan sosial.¹⁷ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa setiap individu harus hidup sejahtera dan mandiri untuk menjalankan kewajiban agama. Oleh karena itu, negara wajib membantu warganya mencapai kestabilan finansial dan mengatasi kemiskinan melalui keadilan sosial, dengan memberikan akses setara terhadap sumber daya dan peluang.¹⁸ Ibnu Taimiyah juga mendorong setiap individu agar berusaha mencapai kesuksesan

¹² Riska Awalia, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *Al Iqtishod* 10, no. 1 (2022): 63–78.

¹³ Kamaruddin Salim, "Gerakan Sosial Dalam Perspektif Mahatma Gandhi," *Ilmu Dan Budaya* 40, no. 51 (2016).

¹⁴ Abdul Hakim Al-Matroudi, "The Hanbali School of Law and Ibn Taymiyyah | Conflict or Conciliation," 2006.

¹⁵ M K Gandhi, "Constructive Programme: Its Meaning and Place," *Navajivan Publishing House*, 1941.

¹⁶ Bahrina Almas and M. Umar Burhan, "ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2014), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2203>.

¹⁷ Ahmad Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terjemahan H. Anshari Thayib* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).

¹⁸ Meriyati Meriyati, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (August 15, 2016): 23–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.36>.

secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.¹⁹ Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan transaksi dan aktivitas ekonomi ke dalam dua kategori: 1) transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan 2) berdasarkan prinsip kedermawanan dan manfaat.²⁰

Ibnu Taimiyah adalah seorang pembaharu (*mujaddid*) Islam pada abad pertengahan yang sangat dihormati dan dikenal sebagai da'i yang tabah dan pemberani.²¹ Ia berpendapat bahwa generasi pertama Muslim berhasil karena mereka berpegang pada ajaran Islam dan menghormati Alquran. Sebaliknya, umat Islam di masanya menjadi lemah karena meninggalkan sumber ajarannya.²² Ibnu Taimiyah menyerukan kepada umat muslim untuk kembali kepada Alquran dan Sunah, serta menggunakan pemahaman dari generasi pertama untuk menilai mazhab dan pemikiran Islam yang ada.²³

Adapun Mahatma Gandhi berpandangan bahwa kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling buruk.²⁴ Dalam perspektif Gandhi, kemiskinan bukan hanya kekurangan materi, tetapi juga kondisi yang memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mental. Ia berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam mencapai keadilan sosial dan kesetaraan.²⁵ Pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan materi, tetapi juga melalui pemberdayaan individu untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan ini, pengentasan kemiskinan menjadi langkah krusial dalam mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan di masyarakat, serta menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab.²⁶

Gandhi juga menekankan pentingnya tindakan nyata dalam mencapai pemerataan ekonomi. Ia menyerukan perubahan dalam cara hidup individu, di mana setiap orang harus menekan kebutuhannya dan menghindari ketidakjujuran. Sumber daya harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memenuhi hasrat pribadi yang berlebihan. Ia menolak gagasan bahwa kekayaan dapat dibagikan secara cuma-cuma tanpa bekerja. Gandhi mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan saling mendukung dalam mencapai

¹⁹ Abd Adim, "Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (August 31, 2021): 35–45.

²⁰ Mohammad Arifin and Reza Hilmy Luayyin, "Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah," *JSE: Jurnal Shariah Economica* 2, no. 2 (2023): 12–26, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>.

²¹ Khalid Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah* (Washington, D.C: Georgetown University, 1979).

²² Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, "Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis," *Amsterdam University Press*, 2006.

²³ Ahmet Kanlidere, "Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809-1917), Reviewed by H. T. Norris," n.d.

²⁴ "Economic Impact of Gandhi's Models | Economics | Articles on and by Mahatma Gandhi," n.d.

²⁵ M. K Gandhi, *Constructive Programme: Its Meaning and Place* (Ahmedabad: Navjeevan Press, 1940).

²⁶ DeVries K, *Gandhi's Philosophy and the Quest for a Nonviolent Society* (New York: Routledge, 1994).

kesejahteraan bersama.²⁷

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis pemikiran ekonomi dari Ibn Taimiyah dan Mahatma Gandhi terkait pengentasan kemiskinan. Metode komparatif berfungsi untuk membandingkan konsep, teori, atau fenomena, serta melihat bagaimana nilai-nilai agama dan moral memengaruhi struktur sosial dan ekonomi. Metode ini tidak hanya mencari perbedaan, tetapi juga mengeksplorasi keterkaitan dan dampak dari pemikiran yang dikaji. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti perbedaan antara pemikiran kedua tokoh, tetapi juga menggali keterkaitan antara ide-ide mereka dan implikasinya dalam kebijakan publik.²⁸

Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang relevan dengan konteks modern. Analisis ini tidak hanya memisahkan pemikiran kedua tokoh, tetapi juga mengidentifikasi implikasi praktis dari teori mereka dalam kebijakan publik.²⁹ Penelitian ini berupaya untuk menawarkan pandangan baru mengenai penerapan solusi pengentasan kemiskinan yang diusulkan oleh dua tokoh besar ini. Studi komparatif ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara agama, ekonomi, dan keadilan sosial.³⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibnu Taimiyah: Biografi, Karya, dan Penjara

Ibnu Taimiyah lahir di Kota Harran pada 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661 H). Bernama lengkap Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abd Allah bin Khidr bin Muhammad bin al-Khidr bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Damayqi.³¹ Ia berasal dari keluarga ulama besar mazhab Hambali. Ayahnya, Abdal Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majduddin merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang keilmuan Islam. Pada tahun 1262 M, ketika Ibnu Taimiyah berusia tujuh tahun, keluarganya terpaksa mengungsi ke Damaskus sebagai akibat dari invasi pasukan Mongol yang mengancam wilayah Harran, kota kecil di bagian utara Mesopotamia,

²⁷ M.K Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).

²⁸ Tabrani, *Arah Baru : Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).

²⁹ Ragin Charles C., *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies* (Berkeley: University of California Press, 1987).

³⁰ Landman Todd, *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*, 2003rd ed. (London: Routledge, n.d.).

³¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta, 2017).

yang kini berada di tenggara Turki.³² Perjalanan hidupnya berlangsung di tengah pergolakan politik dan sosial yang ditandai oleh serangan pasukan Tartar, yang mengharuskan keluarganya meninggalkan Harran dan memperdalam pengetahuan di Damaskus.³³

Terkait asal-usul nama "Ibnu Taimiyah," beberapa ulama berpendapat bahwa kakeknya bertemu dengan seorang perempuan bernama Taimiyah saat menunaikan ibadah haji. Sepulanginya dari haji, ia mendapati putrinya telah melahirkan seorang anak, yang kemudian dinamakan Ibnu Taimiyah. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama tersebut diambil dari nama nenek kakeknya, yaitu Taimiyah.³⁴ Tradisi keilmuan yang baik mengantarkannya menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fiqh, matematika dan filsafat dalam usia belasan tahun. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai penulis, orator sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya wafat, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sebagai Guru Besar Hukum Hambali selama 17 tahun.³⁵ Ibnu Taimiyah wafat di Damaskus pada tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi.³⁶

Ibnu Taimiyah banyak menuliskan karya monumental, di antaranya *Al-Hisbah fi al-Islam* (Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam) dan *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Kewenangan dan Tanggungjawab Penguasa terhadap Rakyat). Buku pertama membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Buku kedua membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik.³⁷ Ibnu Taimiyah banyak mengulas tentang makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.³⁸

Ahli-ahli bid'ah dan khurafat menjadi musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan dari pada pedang.³⁹ Ibnu Taimiyah sering difitnah karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pandangan umum pada masa itu. Akibatnya, ia berulang kali ditangkap oleh penguasa dan hidup berpindah-pindah penjara di

³² E. Amalia, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer" (Gramata Publishing, 2010).

³³ A.A Islahi, "Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah" (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997).

³⁴ A. M. Zahrah, "Ibn Taimiyah Hayatuhu Arauhu Wa Fiqhuhu," *Dar Al-Fikr al-Arabi*, t.t, 2015.

³⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

³⁶ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

³⁷ Adim, "Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam."

³⁸ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

³⁹ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta: INIS, 1991).

Damaskus dan Kairo. Meskipun berada di balik jeruji besi, ia tetap mengajar dan menulis.⁴⁰ Pada Dzulqa'dah 712 H / Februari 1313 M, Ibnu Taimiyah, yang saat itu berusia sekitar 51 tahun, diperintahkan untuk pergi bertempur bersama tentara Islam ke medan perang Yerusalem. Setelah menunaikan tugasnya di Palestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus, ia melanjutkan pengajaran sebagai seorang profesor ulung.⁴¹

Ibn Taimiyah dipenjara enam kali,⁴² berikut rinciannya:

1. Penahanan Pertama (1305 H): Dipenjara selama beberapa bulan karena melontarkan kritik atas praktik ziarah kubur dan penggunaan tawassul.
2. Penahanan Kedua (1306 H): Dipenjara selama satu tahun karena menyebarkan pandangan yang menolak praktik-praktik sufi tertentu.
3. Penahanan Ketiga (1308) Dipenjara selama enam bulan karena pandangannya yang menolak konsep *intercession* (syafaat) yang berlebihan.
4. Penahanan Keempat (1310): Dipenjara selama satu tahun karena mengkritik penguasa dan ulama yang mendukung praktik yang ia anggap syirik.
5. Penahanan Kelima (1320): Dipenjara selama satu tahun karena menyatakan bahwa beberapa tradisi di kalangan masyarakat Muslim adalah *bid'ah*.
6. Penahanan Keenam (1326-1328): Dipenjara dua tahun karena pandangannya yang kontroversial dipandang mengganggu stabilitas politik. Ibnu Taimiyah dipenjara di Benteng Qal'ah di Damaskus hingga meninggal dunia pada malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah.⁴³

Mahatma Gandhi: Biografi, Karya, dan Penjara

Mohandas Karamchand Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat. Kaba Gandhi, ayahnya, seorang diwan di Pengadilan Rajasthanik dan Putlibai, ibunya, merupakan ibu rumah tangga. Keluarga Gandhi berasal dari kasta Bania penganut agama Hindu dengan keyakinan Vaishnavisme. Gandhi menempuh pendidikan dasar dan menengah di Rajkot, mengikuti ayahnya yang pindah ke kota tersebut. Pada usia sekitar tiga belas tahun, ia menikah dengan Kasturba. Di

⁴⁰ Muhibudin, "Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, dan Warisannya)," *Spektra: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 4 No.2 (2022): 100–131.

⁴¹ Farid Syaikh Ahmad, *Biografi Ulama Salaf, Terjemahan Masturi Ilham Dan Asmui Tamam* (Jakarta, 2006).

⁴² T. J. Winter, *Ibn Taymiyya: His Life and Works* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1998).

⁴³ Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Inti Media, 2003).

masa itu pernikahan di bawah umur menjadi sebuah tradisi. Pasangan ini dikaruniai tiga putra.⁴⁴

Pada tahun 1887, Gandhi lulus ujian masuk universitas di Ahmedabad dan melanjutkan studi di Samaldas College. Namun, ia memutuskan keluar karena kesulitan mengikuti perkuliahan. Mavji Dave, seorang Brahmana sekaligus sahabat keluarga, menyarankan agar Gandhi melanjutkan studi hukum di Inggris, mengingat lulusan hukum dari Inggris lebih mudah mendapatkan pekerjaan di India.⁴⁵ Keluarganya awalnya ragu, baik karena masalah biaya maupun karena Gandhi adalah satu-satunya anggota kasta Bania yang akan pergi ke luar negeri. Ibunya akhirnya memberi restu setelah Gandhi berjanji akan tetap menjalani kehidupan vegetarian dan setia pada istrinya. Gandhi tiba di Inggris pada tahun 1888 dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, seperti membaca koran, belajar dansa, bermain biola, dan mempelajari bahasa Prancis. Ia juga bergabung dengan perkumpulan Teosofi, yang memperkenalkannya pada kitab-kitab suci dari berbagai agama, termasuk Injil dan Bhagavadgita, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Sir Edwin Arnold. Gandhi memilih untuk menempuh pendidikan di London Matriculation, meski hukum India dan Hindu tidak diajarkan di sana. Di sana, Gandhi mempelajari hukum Inggris, hukum Romawi, dan bahasa Latin. Pada 10 Juni 1891, Gandhi lulus ujian pengacara dan pulang ke India pada 12 Juni 1891.⁴⁶

Setibanya di Rajkot, Gandhi mendaftarkan diri ke Pengadilan Tinggi. Tidak mudah bagi Gandhi menjadi pengacara di India. Terutama karena ia belum menguasai hukum India, Hindu, dan Islam. Setelah mengalami kesulitan mendapatkan perkara, ia pindah ke Bombay, namun gagal dalam menangani sebuah perkara kecil. Akhirnya, ia kembali ke Rajkot, tetapi karirnya sebagai pengacara di sana terhambat oleh intrik politik dan diskriminasi terhadap suku minoritas, yang merupakan sebagian besar kliennya. Gandhi bahkan pernah diusir dari rumah seorang Sahib (pejabat) karena berusaha membela kakaknya. Dalam situasi ini, Gandhi menerima tawaran untuk menangani perkara Dada Abdullah & Co. di Afrika Selatan. Dengan kesepakatan bekerja selama satu tahun dengan bayaran 105 poundsterling, Gandhi berlayar menuju Durban, Natal, di Afrika Selatan pada tahun 1893.⁴⁷

Kumpulan pidato dan tulisannya dihimpun dengan penuh seksama oleh Sri Krisna

⁴⁴ Shika Goyal, "Mahatma Gandhi Biography: Family, Education, History, Movements, and Facts," *Jagranjosh.Com*, 2024.

⁴⁵ M.K. Gandhi, *An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth* (India: Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1948).

⁴⁶ *Gandhi: Sebuah Otobiografi. Terjemahan Gd. Bagoes Oka* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985).

⁴⁷ "The Life and Work of Mahatma Gandhi | Britannica," n.d.

Kripalani, sekretaris Akademi Sahitya.⁴⁸ Beberapa karya Mahatma Gandhi di antaranya *The Story of My Experiments with Truth* (1927), *Hind Swaraj or Indian Home Rule* (1909), *All Men Are Brothers* (1940), *India of My Dreams* (1947), *Satyagraha in South Africa* (1928), *Unto This Last* (1860), *Gandhi's Philosophy of Non-Violence* (1942), dan *Trusteeship* (1943). Wakil Presiden India periode 1962-1967, Sir Sarvepalli Radhakrishna, dalam pengantarnya pada buku *Semua Manusia Bersaudara* menuliskan, seorang guru agung muncul sekali-kali dalam suatu kurun zaman. Beberapa abad dapat berlalu tanpa melahirkan orang serupa itu. Guru seperti itu adalah Mahatma Gandhi. Dia orang pertama dalam sejarah manusia yang memperluas prinsip pantang kekerasan dari tingkat perorangan ke tingkat sosial politik. Dia memasuki politik dengan tujuan melakukan percobaan atas pantang kekerasan dan telah membuktikan kebenarannya dalam perjuangan kemerdekaan India.⁴⁹

Di Afrika Selatan, Gandhi berhasil membela hak orang-orang India yang bekerja di sana. Di India, Gandhi menjadi tokoh pejuang kemerdekaan melawan kolonialisme Inggris. Berkat perjuangannya, India akhirnya mencapai kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Kemerdekaan itu dicapai bukan melalui senjata, bukan pula dengan kekerasan, tetapi dengan gerakan dan metode anti-kekerasan (ahimsa).⁵⁰ Pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh seorang ekstrimis Hindu yang merasa dikhianati karena perhatian dan keprihatinan Gandhi terhadap kesejahteraan orang-orang muslim.⁵¹

Mahatma Gandhi dipenjara sembilan kali,⁵² berikut rinciannya:

1. Penahanan Pertama (1908) di Afrika Selatan: Dipenjara beberapa bulan karena menentang diskriminasi rasial terhadap komunitas India di Afrika Selatan. Dia memimpin aksi protes terhadap UU Pendaftaran yang diskriminatif.
2. Penahanan Kedua (1917) di India: Dipenjara beberapa hari karena memperjuangkan hak-hak petani di Champaran yang menderita di bawah sistem tanam paksa.
3. Penahanan Ketiga (1922) di India: Dipenjara enam tahun karena memimpin Gerakan di Chauri Chaura non-kerjasama yang menolak dominasi imperial Inggris.
4. Penahanan Keempat (1930) di India: Dipenjara selama satu tahun karena memimpin gerakan

⁴⁸ Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*.

⁴⁹ Gandhi.

⁵⁰ Delviano Gregorius Kapele and Barnabas Ohoiwutun, "Konsep Ahimsa Menurut Mahatma Gandhi dan Relevansinya dalam Komunikasi Manusia Masa Kini: Sebuah Kajian Filsafat," *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)* 2, no. 1 (January 21, 2023): 33–46.

⁵¹ Guruh Prasetyo, Marjono Marjono, and Sumarjono Sumarjono, "The Assassination of Mahatma Gandhi in 1948," *JURNAL HISTORICA* 2, no. 1 (June 11, 2018): 37–51.

⁵² Fischer Louis, *The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings on His Life, Work, and Ideas* (NE York: Random House, 1983).

Salt March yang menentang monopoli garam oleh pemerintah Inggris. Gandhi bersama pengikutnya berjalan sejauh 240 mil ke Laut Arab untuk menghasilkan garam secara independen.

5. Penahanan Kelima (1932) di India: Dipenjara selama enam bulan karena menentang pemisahan suara untuk komunitas "*untouchables*" dalam pemilihan.
6. Penahanan Keenam (1940) di India: Dipenjara selama beberapa bulan karena mengorganisir gerakan penolakan untuk Perang Dunia II.
7. Penahanan Ketujuh (1942-1944) di India: Dipenjara selama hampir dua tahun karena memimpin Gerakan Quit India Movement untuk menyerukan pengunduran Inggris dari India.
8. Penahanan Kedelapan dan Kesembilan: Ada beberapa penahanan singkat lainnya, terutama selama periode perpecahan India, tetapi tidak se-signifikan penahanan sebelumnya.

Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ibn Taimiyah

Ibnu Taimiyah bukanlah sejarawan atau ahli ekonomi murni. Dia lebih seperti dokter praktik yang mendiagnosis penyakit dan meresepkan pengobatan.⁵³ Dia menolak kemiskinan dan berpendapat bahwa setiap orang harus hidup sejahtera dan mandiri. Pandangan Ibn Taimiyah tentang kekayaan dan kemiskinan didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab moral, kesucian kepemilikan pribadi, serta pentingnya kesejahteraan sosial, berikut pernyataannya:⁵⁴

“Sungguh merupakan perbuatan terbaik bagi pemegang otoritas untuk membedakan antara mereka yang patut menerima bantuan dan yang tidak patut, serta berlaku adil dalam mendistribusikan untuk tujuan kehidupan maupun urusan publik. Pendistribusian kembali pendapatan orang kaya bagi orang miskin adalah sesuatu yang adil dan menyeimbangkan tingkat kehidupan penduduk, serta merupakan tanggung jawab negara. Merupakan kewajiban pemegang otoritas (imam) untuk mengumpulkan uang dari sumber mana pun yang menjadi haknya (negara) dan membelanjakannya secara adil dan layak dilaksanakan, serta tidak pernah meniadakan hak dari mereka yang memang berhak. Tentu saja, tujuan dari penghapusan kemiskinan tidak sekadar dilakukan untuk tujuan negatif atau sekadar mendistribusikan kesejahteraan; yang lebih diperlukan adalah bagaimana hal itu dilakukan atas tuntutan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.”

Beberapa poin utama dalam pemikirannya meliputi:

1. Kekayaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral:

Ibn Taimiyah menolak pandangan asketisme yang menjauhi duniawi. Baginya, kebaikan dan

⁵³ Winter, *Ibn Taymiyya: His Life and Works*.

⁵⁴ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).

kebajikan itu terletak pada kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajibannya dan menjauhi hal-hal yang terlarang. Menurut Ibnu Taimiyah, itulah makna sebenarnya dari zuhud.⁵⁵ Dia pun berpendapat kemakmuran adalah alat untuk memenuhi kewajiban agama seperti membantu orang miskin, menafkahi keluarga, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.⁵⁶ Banyak kewajiban agama, seperti zakat, tidak bisa dipenuhi tanpa kekayaan. Oleh karena itu, kekayaan bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi harus digunakan untuk tujuan yang benar.⁵⁷

2. Redistribusi Kekayaan:

Ibn Taimiyah sangat menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, sebuah sistem yang mewajibkan orang kaya untuk menyisihkan sebagian dari hartanya bagi kaum miskin.⁵⁸ Zakat bagi Ibn Taimiyah bukan sekadar tindakan amal, melainkan kewajiban yang fundamental untuk menjaga keadilan sosial.⁵⁹ Distribusi kekayaan dan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang adil agar tidak terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin.⁶⁰

3. Peran Negara:

Ibn Taimiyah mengakui pentingnya intervensi negara untuk mencegah eksploitasi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.⁶¹ Negara harus mengatur perekonomian agar kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang merugikan banyak pihak. Namun, hak milik individu tetap dihormati selama harta tersebut digunakan sesuai dengan syariat Islam. Ibn Taimiyah memiliki pandangan tentang *ummah* (komunitas Muslim) dan bagaimana negara harus berfungsi untuk melayani kepentingan komunitas tersebut.⁶²

4. Penolakan terhadap Eksploitasi:

Ibn Taimiyah menentang sistem ekonomi yang memungkinkan eksploitasi kaum miskin oleh orang kaya. Ia menganjurkan kebijakan yang mencegah individu atau kelompok untuk menumpuk kekayaan atau menggunakannya sebagai alat penindasan. Hal ini bertujuan untuk

⁵⁵ Winter, *Ibn Taymiyya: His Life and Works*.

⁵⁶ Hassan Ahmed, "The Islamic View of Wealth: An Analysis of the Moral and Ethical Dimensions of Islamic Finance.," *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2010.

⁵⁷ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 1997.

⁵⁸ Dani Suryaningrat and Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 85–97, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>.

⁵⁹ Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, 1997.

⁶⁰ Suryaningrat and Wahab, "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi."

⁶¹ "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik | *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*," n.d.

⁶² Al-Matroudi, "The Hanbali School of Law and Ibn Taymiyyah | Conflict or Conciliation."

menjaga keseimbangan ekonomi yang menguntungkan kesejahteraan bersama. Ia mendorong penerapan hukum Islam yang adil untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa sumber daya dikelola demi kepentingan umum.⁶³

5. Kesederhanaan dan Kemandirian:

Pemikiran ekonomi Mahatma Gandhi didasarkan pada visi moral *ahimsa* (tanpa kekerasan) dan *sarvodaya* (kesejahteraan bagi semua).⁶⁴ Pandangannya tentang pengentasan kemiskinan berkisar pada kesederhanaan, kemandirian, dan distribusi sumber daya secara adil.

Gandhi menekankan pentingnya hidup sederhana dan menghindari kemewahan material. Menurutnya, kesederhanaan ekonomi akan membebaskan sumber daya untuk membantu kaum miskin dan membangun rasa kemandirian komunitas. Melalui prinsip *swadeshi* (kemandirian), ia mendorong produksi dan konsumsi lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekonomi eksternal dan eksploitasi asing.⁶⁵ Ia juga menyerukan agar setiap orang hanya mengambil secukupnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, tanpa mengabaikan mereka yang berada dalam kondisi kekurangan.⁶⁶ Pesan Gandhi agar masyarakat hidup dalam kesederhanaan sebagai berikut:

“Marilah kita pikirkan cara bagaimana pembagian harta secara merata dapat dicapai dengan sikap pantang kekerasan. Langkah pertama bagi seseorang yang mengejar cita-cita ini adalah mengadakan perubahan dalam cara hidupnya sendiri. Segala kebutuhannya seharusnya ditekan sampai sesedikit mungkin, dengan mengingat tingkat kemiskinan bangsa India. Lalu pendapatannya haruslah suci dari setiap ketidakjujuran. Ia harus menyingkirkan setiap hasratnya untuk berspekulasi. Rumah kediamannya pun harus disesuaikan dengan gaya hidupnya yang baru. Ia perlu mengendalikan diri dalam setiap bidang kehidupan. Setelah dilaksanakan segala itu dengan sepenuh kemampuannya, barulah ia akan berhak mencanangkan cita-citanya itu kepada rekan-rekan serta sesamanya.”⁶⁷

6. Konsep Perwalian:

Salah satu kontribusi terbesar Gandhi dalam ekonomi adalah konsep perwalian (*trusteeship*). Di mana orang kaya harus bertindak sebagai wali bagi kekayaan mereka dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Gandhi tidak menganjurkan kepemilikan kekayaan oleh negara, tetapi mendukung model distribusi kekayaan yang bersifat sukarela, di mana para pemilik harta akan menggunakan kekayaan mereka untuk kepentingan

⁶³ Al-Matroudi.

⁶⁴ Narayanan K.R, *Gandhi's Economic Thought* (New Delhi: Allied Publishers, 1999).

⁶⁵ Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*.

⁶⁶ Louis, *The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings on His Life, Work, and Ideas*.

⁶⁷ Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*.

masyarakat.⁶⁸

Perwalian adalah teori moral dan praktis yang diperkenalkan oleh Gandhi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana sumber daya dan kemampuan digunakan untuk kesejahteraan semua anggota, bukan untuk kepentingan pribadi.⁶⁹ Prinsip dasar perwalian meliputi Aparigraha (tanpa kepemilikan), Ahimsa (tanpa kekerasan), dan Swaraj (pemerintahan sendiri), yang mengedepankan kebutuhan masyarakat di atas keserakahan dan persaingan individu.⁷⁰ Gandhi memberikan pernyataan terkait sebagai berikut:

“Sekiranya golongan kaya tidak bersedia bertindak sebagai wali amanat bagi kaum miskin dalam makna kata yang sebenarnya dan kaum miskin semakin ditindas serta mati kelaparan, bagaimana seharusnya tindakan kita? Dalam upaya saya untuk mencari pemecahan mengenai masalah ini, saya telah menemukan paham pantang kekerasan, non kooperasi, dan ketidakpatuhan sipil sebagai upaya yang tepat dan pasti akan berhasil. Orang kaya tidak akan dapat mengumpulkan kekayaan, kecuali dengan kerja sama golongan miskin dalam masyarakat itu. Apabila kenyataan ini disadari dan tersebar di kalangan orang miskin, kedudukan mereka menjadi kuat dan mereka pun menyadari bahwa berdasarkan paham pantang kekerasan, mereka dapat membebaskan diri dari penindasan ketidak merataan yang mengantar mereka ke ambang kelaparan.”⁷¹

7. Desentralisasi dan Ekonomi Desa:

Sepanjang hidupnya, Gandhi berjuang untuk membangun sistem sosial ekonomi yang berfokus pada tenaga manusia, dan menolak pemikiran ekonomi modern yang bergantung pada industrialisasi.⁷² Melalui sistem ekonomi *khadi*, yang menggunakan kain tenun tangan secara tradisional, Gandhi berupaya memerangi kelaparan dan meningkatkan kehidupan petani di India. Dengan mengajarkan teknik pemintalan menggunakan *charka*, ia memberdayakan masyarakat pedesaan dan menciptakan lapangan kerja. Sistem ini menjadikan desa sebagai basis ekonomi yang adil dan berkelanjutan.⁷³ Kapas yang dijadikan benang dikirim ke Inggris, diolah menjadi kain, kemudian dijual kembali kepada rakyat India. Untuk mengatasi masalah ini, Gandhi memobilisasi masyarakat agar memproduksi kain sendiri

⁶⁸ Bidyut Chakrabarty, “Gandhi’s Doctrine of Trusteeship: Spiritualizing Interpersonal Relationship,” *Nabakrushna Choudhury Centre for Development Studies*, 2017.

⁶⁹ Gede Agus Siswadi, “Filsafat Nir-Kekerasan Dalam Perspektif Mohandas Karamchand Gandhi dan Relevansinya dalam Pencegahan Gerakan Radikalisme di Indonesia,” *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 2 (2022): 48–65, <https://doi.org/10.33363/swjsa.v5i2.875>.

⁷⁰ Sudarshan Iyengar and Babita Bhatt, “Trusteeship: Gandhian Approach to Reconceptualize Social Responsibility and Sustainability,” in *Social Entrepreneurship and Gandhian Thoughts in the Post-COVID World* (Springer, Singapore, 2023), 29–47, https://doi.org/10.1007/978-981-99-4008-0_2.

⁷¹ Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*.

⁷² Agnes Poerbahari, “Nasionalisme Humanistik Mahatma Gandhi,” *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 9, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i2.211>.

⁷³ Poerbahari.

dengan cara memintal setiap hari di berbagai penjuru India.⁷⁴ Terkait hal ini Gandhi menyerukan pernyataan sebagai berikut:

“Setiap orang seharusnya mendapat pekerjaan yang layak yang memungkinkannya memenuhi seluruh kebutuhannya. Cita-cita ini hanya mungkin dicapai bila seluruh sarana produksi untuk menghasilkan barang keperluan hidup tetap dikuasai oleh rakyat banyak. Segala sarana itu harus tersedia dengan leluasa bagi setiap orang, seperti halnya udara dan air yang merupakan anugerah Tuhan. Segala sarana itu janganlah dijadikan wahana usaha untuk menindas orang lain. Monopolisasi segala sarana produksi oleh suatu negara, bangsa, atau golongan penduduk adalah perlawanan terhadap keadilan. Pengabaian asas wajar ini merupakan penyebab kemiskinan yang kita saksikan sekarang ini, bukan saja di tanah air kita yang sengsara ini, melainkan pula di berbagai wilayah dunia lainnya.”⁷⁵

8. Ekonomi Tanpa Kekerasan:

Pendekatan Gandhi terhadap ekonomi secara inheren bersifat tanpa kekerasan (ahimsa). Ia berpendapat bahwa ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi merupakan bentuk kekerasan, dan pengentasan kemiskinan sejati hanya dapat dicapai melalui cara-cara tanpa kekerasan.⁷⁶ Prinsip ini juga tercermin dalam kritiknya terhadap kapitalisme modern yang menurutnya menghasilkan kekerasan terhadap kaum miskin dan lingkungan. Pemikir Inggris, John Ruskin (1819–1900) memperteguh keyakinan Gandhi bahwa manusia memiliki martabat yang tinggi ketimbang sekadar alat atau sarana untuk bekerja. Ruskin mengkritik secara terang-terangan paham kapitalisme yang mengesampingkan prinsip moral demi mencapai keuntungan. Pemikiran Ruskin ini menjadi titik berangkat pemikiran ekonomi ahimsa dari Gandhi.⁷⁷ Gandhi mewujudkan masyarakat ideal pertama kali di Afrika Selatan dalam dua komunitas yang dibentuknya, yaitu Phoenix Farm dan Tolstoy Farm, serta dua komunitas di India yaitu Ashram Sabharmati dan Wardha.⁷⁸ Terobosan itu buah dari pemikiran Gandhi sebagai berikut:

“Dengan metode pantang kekerasan, kita tidak akan berupaya membinasakan kaum pemilik modal atau kapitalis. Yang hendak kami binasakan ialah sistem kapitalisme. Kami undang kaum pemilik modal itu agar bertindak sebagai pemegang amanat bagi orang-orang yang merupakan andalannya untuk menciptakan, memelihara, dan menambahkan modalnya itu. Dan para buruh tidak perlu menunggu saat tobatnya kaum pemilik modal itu. Jika modal merupakan kekuatan, tenaga buruh pun merupakan kekuatan. Kedua jenis kekuatan itu dapat digunakan secara destruktif atau secara kreatif. Masing-masing mengharapkan yang lain. Segera setelah kaum buruh menyadari kekuatannya, ia memiliki kedudukan untuk bertindak sebagai mitra kaum

⁷⁴ Mohammad Hatta, *Ekonomi Sjarka dan Khaddar Alias Politik Perekonomian Mahatma Gandhi* (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1954).

⁷⁵ Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*.

⁷⁶ Gandhi: *Sebuah Otobiografi. Terjemahan Gd. Bagoes Oka*.

⁷⁷ Kapele and Ohoiwutun, “Konsep Ahimsa Menurut Mahatma Gandhi dan Relevansinya dalam Komunikasi Manusia Masa Kini.”

⁷⁸ Poerbasari, “Nasionalisme Humanistis Mahatma Gandhi.”

pemilik modal, dan bukan tetap menjadi budaknya saja. Namun, bila ia berhasrat menjadi pemilik tunggal, akan dibunuhnya ayam yang bertelur emas.”⁷⁹

Perbandingan Pemikiran

Setelah menganalisis pandangan Ibnu Taimiyah dan Mahatma Gandhi tentang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang dapat dicatat:

1. **Persamaan:**

- Keduanya sepakat bahwa kemiskinan adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dan tindakan kolektif.
- Baik Ibnu Taimiyah maupun Gandhi menekankan pentingnya redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial.
- Keduanya percaya pada tanggung jawab individu dan komunitas dalam membantu sesama yang kurang mampu.

2. **Perbedaan:**

- Pendekatan Ibnu Taimiyah lebih terfokus pada kewajiban agama dan sistem zakat sebagai alat redistribusi kekayaan, sementara Gandhi menekankan pada kemandirian ekonomi dan perwalian atas kekayaan.
- Ibnu Taimiyah melihat peran negara sebagai penting dalam intervensi ekonomi, sedangkan Gandhi lebih menekankan pada desentralisasi dan kekuatan lokal dalam perekonomian.
- Konsep Gandhi mengenai ahimsa dan kesederhanaan berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang lebih bersifat teologis dan hukum.

Implikasi Praktis

Studi ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis mengenai pemikiran kedua tokoh, tetapi juga dapat menawarkan alternatif solusi untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat modern. Beberapa implikasi praktis yang dapat diambil dari pemikiran mereka meliputi:

1. **Implementasi Zakat dan Kedermawanan:**

Negara dan masyarakat perlu mengoptimalkan sistem zakat sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Program-program yang lebih inklusif dan terencana harus dibuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar

⁷⁹ Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*.

menjangkau mereka yang membutuhkan.

2. Pendidikan dan Pemberdayaan:

Fokus pada pendidikan yang membangun kesadaran sosial dan moral, serta mendorong individu untuk mandiri dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, sangat penting.

Pelatihan keterampilan dan pendidikan keuangan juga dapat membantu masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

3. Kemandirian Ekonomi:

Pendekatan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian dan pengembangan lokal, seperti gerakan swadeshi yang diusulkan Gandhi, dapat membantu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal.

4. Kebijakan Publik yang Responsif:

Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang lebih adil dan inklusif harus diutamakan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

4. KESIMPULAN

Ibn Taimiyah dan Mahatma Gandhi memberikan kontribusi penting dalam membentuk pendekatan etis terhadap pengentasan kemiskinan. Keduanya sepakat bahwa aspek moral, redistribusi kekayaan, dan pencegahan eksploitasi sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ibn Taimiyah menekankan kewajiban zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen untuk mencapai pemerataan kekayaan dan kesejahteraan bersama, menghindari akumulasi kekayaan pada sekelompok orang yang dapat menciptakan ketimpangan sosial. Sementara Gandhi memperkenalkan konsep perwalian (*trusteeship*), di mana kekayaan dipandang sebagai titipan yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan sebagai milik pribadi. Selain itu, ia mendorong kemandirian ekonomi melalui pendekatan swadeshi (kemandirian ekonomi), yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi lokal guna memberdayakan masyarakat miskin dan mengurangi ketergantungan pada sistem kapitalis yang sering kali memperbesar kesenjangan.

Dengan menggabungkan pandangan Ibn Taimiyah dan Gandhi, dapat dirumuskan pendekatan komprehensif dalam pengentasan kemiskinan. Pandangan ekonomi berbasis ajaran agama Ibn Taimiyah dapat berfungsi sebagai mekanisme formal untuk redistribusi kekayaan, sementara konsep perwalian dan kemandirian Gandhi mendorong pemberdayaan masyarakat miskin. Studi komparatif ini menunjukkan bahwa solusi pengentasan kemiskinan memerlukan

sinergi antara pendekatan ekonomi, etis, dan moral yang lebih luas, guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Adim, Abd. "Pandangan Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (August 31, 2021): 35–45.
- Ahmed, Hassan. "The Islamic View of Wealth: An Analysis of the Moral and Ethical Dimensions of Islamic Finance." *Journal of Islamic Banking and Financ*, 2010.
- Almas, Bahrina, and M. Umar Burhan. "Zakat dan Pajak: Keadilan Redistribusi Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 2 (2014). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2203>.
- Al-Matroudi, Abdul Hakim. "The Hanbali School of Law and Ibn Taymiyyah | Conflict or Conciliation," 2006.
- Amalia, E. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer." Gramata Publishing, 2010.
- Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*. Jakarta: INIS, 1991.
- Arif, Al, and M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arifin, Johan. "Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Sosio Informa* 6, no. 2 (August 25, 2020): 114–32. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>.
- Arifin, Mohammad, and Reza Hilmy Luayyin. "Diskursus Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023): 12–26. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.711>.
- Awalia, Riska. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah." *Al Iqtishod* 10, no. 1 (2022): 63–78.
- Bertens, Kees. *Etika*. Vol. Vol. 21. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Chakrabarty, Bidyut. "Gandhi's Doctrine of Trusteeship: Spiritualizing Interpersonal Relationship." Nabakrushna Choudhury Centre for Development Studies, 2017.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta, 2017.
- Charles C., Ragin. *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum." *Jurnal Litigasi* Vol. 22, no. 2 (2021): 205–29.

- “Economic Impact of Gandhi’s Models | Economics | Articles on and by Mahatma Gandhi,” n.d.
- Gandhi, M. K. *Constructive Programme: Its Meaning and Place*. Ahmedabad: Navjeevan Press, 1940.
- Gandhi, M. K. “Constructive Programme: Its Meaning and Place.” Navajivan Publishing House, 1941.
- Gandhi, M.K. *An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth*. India: Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1948.
- Gandhi, M.K. *Semua Manusia Bersaudara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Gandhi: Sebuah Otobiografi. Terjemahan Gd. Bagoes Oka. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985.
- Goyal, Shika. “Mahatma Gandhi Biography: Family, Education, History, Movements, and Facts.” Jagranjosh.Com, 2024.
- Hatta, Mohammad. *Ekonomi Sjarka Dan Khaddar Alias Politik Perekonomian Mahatma Gandhi*. Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1954.
- Ilmi, Syaiful. “Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam.” *Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.
- Iqbal, Muhammad. *100 Tokoh Terhebat Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Inti Media, 2003.
- Islahi, A.A. “Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah.” Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- _____. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Islahi, Ahmad Azim. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terjemahan H. Anshari Thayib*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Iyengar, Sudarshan, and Babita Bhatt. “Trusteeship: Gandhian Approach to Reconceptualize Social Responsibility and Sustainability.” In *Social Entrepreneurship and Gandhian Thoughts in the Post-COVID World*, 29–47. Springer, Singapore, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4008-0_2.
- Jindan, Khalid. *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*. Washington, D.C: Georgetown University, 1979.
- K, DeVries. *Gandhi’s Philosophy and the Quest for a Nonviolent Society*. New York: Routledge, 1994.
- Kanlidere, Ahmet. “Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the Kazan Tatars (1809-1917), Reviewed by H. T. Norris,” n.d.
- Kapele, Delviano Gregorius, and Barnabas Ohoiwutun. “Konsep Ahimsa Menurut Mahatma Gandhi Dan Relevansinya Dalam Komunikasi Manusia Masa Kini: Sebuah Kajian Filsafat.” *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)* 2, no. 1 (January 21, 2023): 33–46.

- K.R, Narayanan. *Gandhi's Economic Thought*. New Delhi: Allied Publishers, 1999.
- Louis, Fischer. *The Essential Gandhi: An Anthology of His Writings on His Life, Work, and Ideas*. NE York: Random House, 1983.
- Ma'wa, Roudlotul, and Iwan Fahri Cahyadi. "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Kudus) | Ma'wa | JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus," n.d.
- Meriyati, Meriyati. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (August 15, 2016): 23–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.36>.
- Muhibudin. "Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, dan Warisannya)." *Spektra: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 4 No.2 (2022): 100–131.
- "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik | *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*," n.d.
- Poerbasari, Agnes. "Nasionalisme Humanistis Mahatma Gandhi." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 9, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v9i2.211>.
- Prasetyo, Guruh, Marjono Marjono, and Sumarjono Sumarjono. "The Assassination of Mahatma Gandhi in 1948." *JURNAL HISTORICA* 2, no. 1 (June 11, 2018): 37–51.
- Prawoto. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, April 1, 2008. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1530/1578>.
- Rahman, Putri Anita, Firman Firman, and Rusdinal Rusdinal. "Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu Sosiologi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (December 3, 2019): 1542–48. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>.
- S, Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Salim, Kamaruddin. "Gerakan Sosial Dalam Perspektif Mahatma Gandhi." *Ilmu dan Budaya* 40, no. 51 (2016).
- Siswadi, Gede Agus. "Filsafat Nir-Kekerasan Dalam Perspektif Mohandas Karamchand Gandhi Dan Relevansinya Dalam Pencegahan Gerakan Radikalisme Di Indonesia." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 2 (2022): 48–65. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v5i2.875>.

- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Suryaningrat, Dani, and Abdul Wahab. "Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 85–97. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>.
- Syaikh Ahmad, Farid. *Biografi Ulama Salaf, Terjemahan Masturi Ilham Dan Asmui Tamam*. Jakarta, 2006.
- Tabrani. *Arah Baru : Metodologi Studi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- "The Life and Work of Mahatma Gandhi | Britannica," n.d.
- Todd, Landman. *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction*. 2003rd ed. London: Routledge, n.d.
- Utami, Farathika Putri. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh | Jurnal Samudra Ekonomika," n.d.
- Wargadinata, Wildana. *Islam dan pengentasan kemiskinan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011. <http://repository.uin-malang.ac.id/1191/>.
- Winter, T. J. *Ibn Taymiyya: His Life and Works*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 1998.
- Zahrah, A. M. "Ibn Taimiyah Hayatuhu Arauhu Wa Fiqhuhu." *Dar Al-Fikr al-Arabi*, t.t, 2015.
- Zayd, Naşr Hāmīd Abū. "Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis." Amsterdam University Press, 2006.